

BAHAYA KEBANGKRUTAN IDEOLOGI DAN KEKUATAN FILOSOFIS PANCASILA**Sylvester Kanisius Laku**

*

*Fakultas Filsafat dan peneliti di
Pusat Studi Pancasila (PSP),
Universitas Katolik Parahyangan,
Bandung, Indonesia.*

Email : kanisius@unpar.ac.id

Masuk : 18 April 2025
Revisi : 2 Mei 2025
Diterima : 29 Mei 2025
Diterbitkan : 27 Juni 2025

Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Pembumian
Pancasila



Artikel ini berlisensi [Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar filosofis bangsa Indonesia, mencerminkan visi kreatif para pendiri bangsa yang mengintegrasikan keragaman budaya, sosial, dan politik Nusantara. Artikel ini membahas potensi krisis ideologi Pancasila di tengah dinamika global dan perkembangan sains serta teknologi. Mengacu pada pemikiran tokoh seperti Marx, Nietzsche, dan Lyotard, kebangkrutan ideologi terjadi ketika ideologi kehilangan relevansi dalam menjawab tantangan sosial-politik. Pancasila menghadapi ancaman serupa akibat minimnya pemahaman epistemologis dan antusiasme masyarakat, serta lemahnya implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan bernegara. Namun, Pancasila memiliki kekuatan hermeneutik yang bersumber dari proses dialektis dan komunikatif dalam perumusannya, sebagaimana diuraikan melalui konsep fusi horison Gadamer. Artikel ini mengusulkan tiga model filosofis untuk memahami Pancasila: logosentrisme, yang menempatkan Pancasila sebagai sumber rasional; strukturalisme, yang melihatnya sebagai struktur nilai yang holistik; dan dialektika, yang menekankan komunikasi nilai-nilai Pancasila dengan keragaman masyarakat. Pendekatan dialektis dianggap paling relevan untuk menjaga eksistensi Pancasila dengan terus mendialogkan nilainya dengan realitas sosial, budaya, dan agama masyarakat Indonesia, sehingga tetap relevan dan kokoh sebagai identitas bangsa.

Keywords: *Ideologi, Filosofis, Kebangkrutan Ideologi, Hermeneutika, Logosentrisme, Strukturalisme, Dialektika.*

Cara Mengutip

Laku, S. K. (2025). BAHAYA KEBANGKRUTAN IDEOLOGI DAN KEKUATAN FILOSOFIS PANCASILA. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 5(1) : 53-62. DOI : <https://doi.org/10.63758/jpp.v5i1.64>

Pendahuluan

Tidak ada sejarah suatu bangsa tanpa pemikiran kreatif terhadap visi dan tujuan hakiki terhadap keberadaannya. Pancasila merupakan salah satu pemikiran kreatif yang menandai sejarah keberadaan Bangsa Indonesia di rahim Nusantara. Pemikiran-pemikiran dalam Pancasila menunjukkan dengan sangat jelas dan gamblang visi yang sangat kuat, dalam, dan holistik yang mengungkapkan keberadaan seluruh entitas suku-bangsa di Indonesia, tidak hanya untuk satu masa, tetapi untuk jangka waktu yang lama dan jauh menembus waktu di masa depan. Tidak berlebihan jika kemudian penulis menggunakan istilah ide kreatif-filosofis untuk menunjukkan salah satu karakter khas dan mendasar dari Pancasila sebagai judul artikel ini. Selain pengakuan terhadap Pancasila sebagai *philosophische groondslag*, *Weltanschauung*, dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi, dan lain sebagainya, tampaknya pemikiran bahwa Pancasila merupakan ide kreatif-filosofis dan politis para pendiri bangsa perlu juga diluncurkan dan dimunculkan ke permukaan bidang gagasan dan diskusi ilmiah.

Membaca kembali sejarah perumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 hingga pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, pandangan atau pemikiran kita segera mengarahkan kita pada suatu pengakuan akan daya kreatif para tokoh energik kala itu. Kita tentu saja dapat membayangkan suatu dinamika komunikasi yang agresif, proaktif, provokatif, dan produktif yang melibatkan tokoh-tokoh nasional seperti Yamin, Soepomo, Hatta, dan Soekarno. Dinamika yang terjadi tidak saja bertujuan persuasif-retoris dan politis, tetapi jauh lebih mendasar dan mendalam, akademis dan filosofis. Secara politis, persinggungan antar ide-ide dimaksudkan untuk meyakinkan pihak lain terhadap gagasan yang dihadirkan, tetapi sekaligus ide-ide tersebut merupakan hasil pendalaman dan penggalian (akademis dan filosofis) yang serius terhadap dinamika keberadaan bangsa Indonesia di masa lalu hingga masa yang akan datang.

Meski diakui bahwa eksistensi Pancasila akan sulit dihapuskan dan nilai-nilainya tidak mudah dirubuhkan, tetapi sejarah dunia memperlihatkan bahwa sebagai ideologi dunia yang pada awalnya berdiri dengan gagah perkasa, pada akhirnya runtuh bersama hilangnya pengaruh dan pesona mistisnya. Pancasila sebagai ideologi berpotensi bernasib serupa. Meski kita tahu bahwa kekuatan Pancasila ada pada daya kompromi yang diwariskan para pendiri bangsa, tetapi kesadaran akan ketahanan ideologi juga mempengaruhi keyakinan kita juga. Terhadap situasi dan konteks yang diuraikan tersebut, penulis mencoba menawarkan suatu perspektif lain untuk melihat dinamika filosofis sebagai basis pemikiran untuk merefleksikan eksistensi ideologi Pancasila.

Fenomena Kebangkrutan Ideologi

Konsep ideologi telah mengalami evolusi dan perkembangan konseptual oleh para intelektual sejak penggunaan pertamanya oleh Destutt de Tracy pada abad ke-18. Tracy mendefinisikan ideologi sebagai *science of the formation of ideas*; ilmu tentang konstruksi ide atau gagasan. (2009 :10-36). Sebagaimana dia jelaskan, “Ilmu yang disebut ideologi yang sehat dimaksudkan untuk pembentukan gagasan-gagasan kita, untuk berbagai operasi kecerdasan kita, yang mengajarkan kita berbagai macam hal, yang memungkinkan kita mengetahui sifatnya, dan menunjukkan kepada kita alasan mengapa hal-hal tersebut begitu sulit dipahami” (2009 : 17). Bagi Tracy ilmu yang dia sebut ideologi sangat mengandalkan pada ilmu probabilitas, yang menurutnya berbeda dengan yang dia bayangkan sebagai kalkulasi probabilitas karena mencakup banyak objek yang tidak dapat dicapai oleh yang lain. Dan menariknya ilmu ini benar-benar mengandalkan pada kemampuan berpikir manusia atau logika (2009 :18).

Dalam perkembangannya, ideologi kemudian bertransformasi dari pengertian ilmu tentang gagasan atau ide menjadi semacam alat sosial-politik yang mengandung propaganda, strategi kekuasaan, dan cara hidup (praksis hidup masyarakat). Sebut saja para pemikir seperti Karl Marx, Vladimir Lenin, atau Antonio Gramsci yang melihat ideologi sebagai alat untuk strategi kekuasaan dan praksis hidup masyarakat. Konsekuensinya ideologi yang semula dipahami sebatas konsep epistemologis, bergeser meninggalkan sarang epistemologisnya menerobos zona praksis atau cara hidup suatu masyarakat. Ideologi pada akhirnya menjadi gerakan bersama suatu masyarakat yang percaya pada pemikiran atau gagasan kreatif tertentu.

Secara terminologis, tentu saja, tidak ada istilah spesifik dalam teori politik modern mengenai kebangkrutan atau keruntuhan ideologi. Penulis menggunakan istilah ini untuk menggambarkan krisis ideologi yang mengarah kepada kegagalannya dalam menyediakan solusi alternatif bagi persalan-persoalan sosial-

politik masa kini. Istilah ini juga terinspirasi dari berbagai sumber teori yang tersebar dalam dunia filsafat mengenai krisis ideologi yang mengarahkannya pada kehancuran atau kebangkrutan. Sebut saja tokoh-tokoh besar seperti Karl Marx yang mengkritik ideologi (Liberalisme-Kapitalisme) sebagai alat kelas penguasa dan berargumen bahwa ketimpangan kelas dapat menyebabkan munculnya kesadaran revolusioner. Karena alasan itulah, Marx dalam karyanya *The German Ideology* meyakini bahwa sosialisme-komunisme dapat menggantikan ideologi yang dianggapnya menindas tersebut (1846).

Di lain tempat, kita juga dapat menemukan filsuf Jerman lain, Friedrich Nietzsche. Dalam bukunya *Thus Spoke Zarathustra* (1883–1885) dan *Beyond Good and Evil* (1886), Nietzsche melancarkan kritik terhadap agama dan metafisika Barat yang dianggapnya tidak dapat menyediakan jawaban yang memadai bagi kebutuhan konkret manusia. Secara spesifik dia menyebutnya sebagai bentuk kekosongan yang nihil (nihilisme). Karena itu pula, dia menganjurkan penciptaan nilai-nilai baru yang lebih mampu menyediakan jawaban real bagi manusia. Bahkan Hannah Arendt, filsuf perempuan Jerman yang sangat populer, dalam bukunya *The Origins of Totalitarianism* (1951) dan *The Human Condition* (1958), tidak saja menganggap bahwa ideologi totaliter telah runtuh, tetapi juga memprediksi bahwa demokrasi sebagai alat politik modern juga akan menemukan kegagalan dan runtuh suatu ketika.

Kita dapat menganalisis kemungkinan matinya ideologi berdasarkan gagasan lain yang dikemukakan oleh Karl Mannheim dalam *Ideology and Utopia* (1929). Mannheim, misalnya, menggambarkan kebangkrutan ideologi dalam situasi di mana ideologi kehilangan kekuatan ketika terjadi perubahan struktur sosial masyarakat atau ketika ideologi mapan dikritik dan diisolasi oleh kekuatan baru yang lebih dominan seperti sains, agama, atau komunitas sosial-politik yang lebih dominan. Terlebih ketika ideologi kehilangan kesanggupan untuk menjelaskan relevansinya atau signifikansinya dengan realitas sosial serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini yang terus menerus mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat.

Dalam filsafat modern-kontemporer gagasan serupa dapat ditemukan pada karya Jean-François Lyotard dalam *The Postmodern Condition* (1979). Lyotard mengemukakan kebangkrutan ideologi dalam konteks “kematian meta-narasi” (*the death of meta-narrative*). Lyotard memandang bahwa ideologi-ideologi besar seperti Marxisme, liberalisme, atau bahkan komunisme akan kehilangan kekuatan dan pengaruh persuasifnya karena masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan dan harapan terhadap narasi-narasi besar tersebut. Sebagaimana dia kemukakan, “....saya mendefinisikan postmodern sebagai ketidakpercayaan terhadap metanarasi” (1979:xxiv). Ini disebabkan oleh mudahnya atau merosotnya kemampuan narasi-narasi besar menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat global dan universal.

Pandangan yang sama, tetapi sedikit berbeda dalam hal konteks dikemukakan juga oleh Francis Fukuyama sebagaimana bisa ditemukan dalam buku *The End of History and The Last Man* (1992). Dalam buku tersebut Fukuyama berargumen bahwa benturan antara ideologi liberal-demokrasi di satu sisi dan Fasisme dan Komunisme di sisi lainnya menyebabkan kebangkrutan bagi dua ideologi besar tersebut karena gagal menyediakan solusi alternatif bagi persoalan-persoalan sosial-ekonomi masyarakat global saat ini di masa depan. Dalam pengantar bukunya, Fukuyama mengemukakan pandangannya bahwa, “Komunisme di zaman kita saat ini tengah digantikan oleh demokrasi liberal karena kesadaran bahwa komunisme menyediakan suatu bentuk pengakuan yang sangat cacat” (1992:xix). Hancurnya Komunisme membuka akses dan ruang yang tak terbandung bagi Liberalisme-Kapitalisme untuk berkembang dan menacapkan cakarnya hampir di seantero dunia.

Gagasan-gagasan tersebut memperlihatkan bagaimana ideologi-ideologi besar dunia pada akhirnya akan menemukan dan menghadapi batas dan krisis diri ketika tidak mampu lagi menjawab persoalan-persoalan masa kini terutama ketika berhadapan dengan gagasan lain yang lebih dominan atau katakanlah dalam konteks filsafat lebih rasional dan dapat diandalkan (*reliable*). Sains dan teknologi dewasa ini dianggap sebagai saingan ideologi mapan yang masih bertahan seperti liberal-demokrasi dan kapitalisme.

Pancasila di Pusaran kebangkrutan Ideologi

Pancasila sejak perumusannya dimaksudkan sebagai sebarang keyakinan, sistem nilai, sistem politik, dan identitas masyarakat Indonesia. Pancasila dirumuskan sedemikian rupa melalui dinamika politik yang cermat dan seksama sehingga dapat dijadikan sebagai sistem keyakinan politik bersama seluruh masyarakat. M.T. Soerjanto Poespowardjo dan Alexander Seran dalam “Pancasila: Filsafat Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Roh Revolusi Mental” menginformasikan bahwa dari berbagai sumber terdokumentasi

adanya persandingan argumentasi dari para tokoh dan golongan yang terlibat dalam dinamika perumusan Pancasila untuk memenangkan pandangan masing-masing. (2021: 34). Ini menunjukkan bahwa sejak awal Pancasila hadir sebagai ideologi yang dinamis dan menyangkut keseluruhan masyarakat yang beragam. Keyakinan akan kekuatan keragaman mendorong para tokoh pendiri bangsa (*founding father*) mengarahkan pemikiran bersama pada upaya membangun fondasi kebangsaan yang lebih kuat dan kokoh. Ini dimaksudkan agar Indonesia yang dikehendaki tidak hanya seumur jagung, tetapi dapat bertahan dalam rentang waktu yang lama dan panjang. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa cara berpikir masyarakat saat ini, melalui perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan kompleks, semakin kreatif dan produktif.

Dinamika ideologi yang terjadi di dunia Barat, sedikit banyak memengaruhi proses ideologisasi dan internalisasi (pendidikan ideologi) Pancasila di Indonesia. Meski persilangan pendapat atau gagasan terkait dengan esensi (substansi) dan eksistensi Pancasila tidak tampak agresif, hembusan yang mengayun perlahan dari kekuatan tersembunyi seperti fanatisme radikal kelompok religius, kolektifisme-primordial, globalisasi, meningkatnya akses informasi, dan sebagainya sedikit banyak memengaruhi eksistensi Pancasila. Artinya, Pancasila selalu berada di pusaran tantangan menghadapi berbagai situasi dan fenomena sosial-politik yang terjadi, baik secara internal maupun secara eksternal.

Salah satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan adalah tidak banyak generasi saat ini yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang sejarah Pancasila, substansi epistemologis, dan dinamika yang terjadi di baliknya. Sebagian besar bahkan tidak berminat mendalaminya secara lebih serius, selain karena bentuk partisipasi dalam pelajaran atau perkuliahan wajib akademik. Karena itu, pemahaman terhadap Pancasila hanya sampai pada batas epistemologi minimal yang umumnya ditemukan dalam pemikiran banyak orang Indonesia. Maksudnya adalah bahwa pengetahuan terhadap Pancasila sebatas lima dasar atau sila yang biasanya diajarkan. Hal ini bukan sekedar asumsi, tetapi fakta yang didasarkan pada survey terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengawali perkuliahan Pendidikan Pancasila yang dilakukan penulis pada mahasiswa peserta kuliah. Situasi ini menurut pemikiran penulis dapat menguatkan ancaman terhadap Pancasila dan mendorongnya secara perlahan ke arah kemerosotan.

Sementara kita ketahui dan pahami bahwa sebuah bangsa akan kuat jika semua warganya tidak saja mengetahui dan memahami, tetapi jauh lebih penting dan mendasar adalah memiliki kesadaran akan ikatan kolektif dalam bentuk ideologi sebagai ajaran dan keyakinan fundamental bangsa tersebut. Sebagaimana J.J. Rousseau telah mengingatkan tentang perlunya kesadaran kolektif dengan menganjurkan bahwa, “Masing-masing dari kita menempatkan diri dan seluruh kekuatannya secara bersama-sama di bawah arahan tertinggi kehendak umum; dan sebagai satu tubuh, kita menerima setiap anggota sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan” (1994 : 55). Kehendak umum sebagai kesadaran kolektif dapat dimanifestasikan dalam bentuk pemahaman bersama terhadap tujuan dan nilai-nilai yang mengikat dan menyatukan mereka. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut tertata dan terbentuk melalui Pancasila.

Meski kesadaran kolektif dapat mengikat dan menyatukan suatu masyarakat, bahaya yang seringkali menunggangi kesadaran tersebut adalah kehendak untuk berkuasa. Sebagaimana diingatkan juga oleh Rousseau bahwa kesadaran kolektif dapat terdistorsi jika kepentingan pribadi atau kelompok mendominasi, sehingga jalan keluar yang diperlukan adalah pendidikan dan partisipasi aktif warga masyarakat untuk tidak saja melindunginya, tetapi juga merefleksikannya secara kritis dan kreatif. Bahaya yang sama juga diingatkan oleh Paul Ricoeur dalam bukunya *Lectures on Ideology and Utopia* (1986). Meski meyakini bahwa ideologi dapat berperan positif sebagai pemersatu, Ricour mengingatkan bahwa karena karakternya yang elusif ideologi sebagai kesadaran kolektif dapat saja direduksi menjadi sumber legitimasi dan justifikasi bagi otoritas yang berkuasa serta potensi mendistorsi realitas sosial dengan menyamarkan bahkan menyembunyikan ketidakadilan demi melindungi kepentingan kelompok yang lebih dominan (1986:12).

Berdasarkan uraian mengenai fungsi dan peran ideologi sebagai kesadaran kolektif sebagaimana dikemukakan oleh Rousseau dan Ricoeur di atas, dapat dilakukan analisis terhadap peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Sebagaimana sejarah telah mencatat bahwa Pancasila sebagai sebuah kesadaran kolektif telah memainkan peran dan fungsi sebagai pemersatu (integrasi), legitimasi atau justifikasi otoritas, dan distorsi realitas sosial-politik. Peran positif sebagai pemersatu menguntungkan Indonesia yang berlatar belakang realitas sosial, politik, budaya, agama, atau etnis yang sangat majemuk. Keyakinan akan nilai-nilai Pancasila mampu mempertemukan keragaman tanpa menyeragamkan dan menyatukan perbedaan tanpa meniadakan. Sementara itu, fungsi justifikasi otoritas dan distorsi realitas sosial-politik diperankan oleh Pancasila ketika kekuasaan mencoba memanfaatkan atau memperalat ideologi sebagai pembenaran terhadap garis kebijakan

atau aktivisme sosial-politik penguasa. Tampaknya boleh diasumsikan bahwa terkait dengan dua fungsi terakhir tersebut, Pancasila mengalami kemerosotan yang mengarah pada hilangnya dukungan epistemologis di kalangan masyarakat luas.

Klaim kebangkrutan ideologis bisa jadi berlebihan. Karena itu, kekhawatiran akan kebangkrutan ideologi tidak dimaksudkan pada ketiadaan ideologi, tetapi pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan dan mekanisme kerja pejabat publik yang mengarah pada ketidakpercayaan terhadap Pancasila. Dalam konteks sosial-politik, kekuatan ideologi terletak pada kesatuannya tidak saja dengan cara hidup suatu masyarakat, tetapi terutama dengan perilaku para pejabat publik, agen administrasi negara, atau aktor politik. Ketika perilaku masyarakat Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diisyaratkan oleh ideologi Pancasila, maka kita bisa segera mewaspadai isyarat lampu kuning kekhawatiran eksistensi ideologi Pancasila mulai memasuki fase merosot, bahkan mengarah ke fase runtuh.

Kekuatan Hermeneutik Ideologi Pancasila.

Situasi kompleks sebagaimana digambarkan di atas menuntut suatu kepekaan epistemologis setidaknya untuk mencari kemungkinan filosofis sebagai dasar justifikasi terhadap eksistensi dan implementasi Pancasila sebagai ideologi. Dengan mencermati pengandaian Marx dan Engel yang memandang ideologi sebagai bentuk kesadaran palsu (*false consciousness*) atau keyakinan yang menyesatkan (*misguided beliefs*), penulis meyakini bahwa Pancasila bukanlah jenis ideologi sebagaimana dimaksudkan oleh keduanya.

Pancasila adalah ideologi yang sejak awal dikonstruksi berdasarkan keyakinan bahwa nilai-nilai tersebut bersumber dari tradisi, prinsip, bahkan spirit hidup yang dipraktikkan oleh masyarakat bangsa-bangsa selama berabad-abad dan diwariskan oleh para leluhur bangsa Indonesia. Pancasila adalah kesadaran akan dasara yang lebih luas daripada bangsa. Sebagaimana Soekarno berujar, “Persatuan nasional hanya dapat dipelihara kekal dan abadi jikalau persatuan nasional itu didasarkan atas satu dasar yang lebih luas daripada bangsa” (2006 : 87). Lebih lanjut Soekarno mengatakan bahwa Pancasila merupakan sebuah *geloof*, suatu arah pikiran, atau suatu arah kepercayaan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat (2006: 87). Lahirnya Pancasila bukan sebagai anti-tesis (perlawanan) terhadap ideologi sebagaimana Komunisme Marxian terhadap Kapitalisme, sosialisme terhadap liberalisme-demokrasi, melainkan suatu keyakinan kolektif (*collective Beliefs*) masyarakat Indonesia yang didefinisikan sebagai tiang pokok penyangga bangunan Indonesia.

Pancasila dilihat dari sisi historisnya merupakan proses penghargaan timbal balik secara komunikatif yang bermuara pada pembentukan kehendak bersama dalam suatu ikatan sosial-politik. Pandangan ini merupakan suatu pengandaian terhadap proses pembentukan Pancasila yang tidak saja terjadi secara politis, tetapi juga filosofis. Klaim penulis bahwa proses tersebut adalah juga filosofis bersandar pada keyakinan bahwa wacana politik dan kebangsaan, dalam hal ini nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Nusantara tersebut, ditelaah, didalami, dan direfleksikan melalui suatu upaya rasional atau bernalar dalam semangat partisipasi demokratis yang mengarah pada tindakan komunikatif timbal balik. Setidak-tidaknya dalam risalah kelahiran Pancasila kita dapat menemukan fakta bahwa wacana ideologi Pancasila diproduksi dalam suatu momen sintesis atau fusi idealistik secara filosofis. Soekarno berujar bahwa nilai-nilai Pancasila tidak lahir dari *creatio ex nihilo* (ketiadaan), tetapi diserap dari rahim budaya bangsa Indonesia yang sudah hidup selama beratus-ratus tahun. Soekarno menggunakan kata menggali Pancasila. Secara filosofis, terminologi menggali mengartikan suatu upaya hermeneutik untuk menemukan dan memaknai nilai-nilai tersebut dalam konteks pembentukan Indonesia sebagai bangsa. Menggali sesuatu yang terkait dengan nilai, yang terpendam di kedalaman rahim budaya bangsa-bangsa di Nusantara selalu melibatkan tindakan reflektif dan komunikatif. Situasi khas yang menyertai lahirnya Pancasila selain berasal dari ketidaktiadaan (*presence*), ia juga lahir dari kesatuan berbagai pikiran dan gagasan para tokoh pendiri bangsa.

Deskripsi historis secara ringkas di atas memperlihatkan kepada kita situasi hermeneutis yang oleh Hans-Georg Gadamer disebut sebagai fusi horison (*fusion of horizon*) (1989). Fusi horison dalam konteks hermeneutika Gadamer mengacu pada proses perjumpaan dan penyatuan perspektif atau pemikiran seseorang dalam hal ini pembaca atau pembicara dengan teks atau peristiwa yang kemudian melahirkan suatu pemahaman atau cara pandang baru. Gadamer mengatakan, “Dalam proses pemahaman, terjadi peleburan horison yang nyata—yang berarti bahwa ketika horison historis diproyeksikan, horison tersebut secara bersamaan digantikan. Mewujudkan peleburan ini dengan cara yang teratur adalah tugas dari apa yang kita sebut kesadaran yang dipengaruhi secara historis.” (1989:305-306)

Pemahaman bahwa pembentukan ideologi Pancasila didasarkan atas kesadaran akan kemampuan para tokoh pendiri bangsa untuk keluar dari jebakan egoisme sektoral, dari batas-batas yang ditetapkan tradisi, dan pemikiran yang dapat mengeksklusi mereka satu terhadap yang lain menunjukkan suatu kemampuan dan kematangan hermeneutik untuk mengolah apa yang Gadamer sebut situasi hermeneutika (1989:305). Sebagaimana dicatat dalam sejarah dan secara sekilas telah penulis uraikan di atas bahwa perjumpaan antar tradisi dan keyakinan yang terjadi dalam kesadaran historis para pemimpin bangsa ketika itu melibatkan pengalaman ketegangan yang kemudian mengental menjadi kesadaran kebangsaan yang lebih luas dan luhur.

Tentu saja fusi horison tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu dialog atau dialektika antar ide, pemikiran, gagasan, dan keyakinan. Inilah suatu proses yang penulis sebut pengelupasan atau pelepasan imanensi yang menemukan jalan kesadaran kolektif menuju transendensi. Pancasila semacam proses trensendensiasi tersebut. Proses perpaduan atau penyatuan yang saling memaknai dan memperkaya melalui konstruksi kreatif dan produktif pemikiran dan gagasan yang terlibat. Melalui interaksi ini, berbagai horison saling memengaruhi dan menghasilkan gagasan baru yang memiliki kekuatan ideologis melampaui yang bukan milik salah satu horison secara eksklusif, melainkan perpaduan dari keduanya.

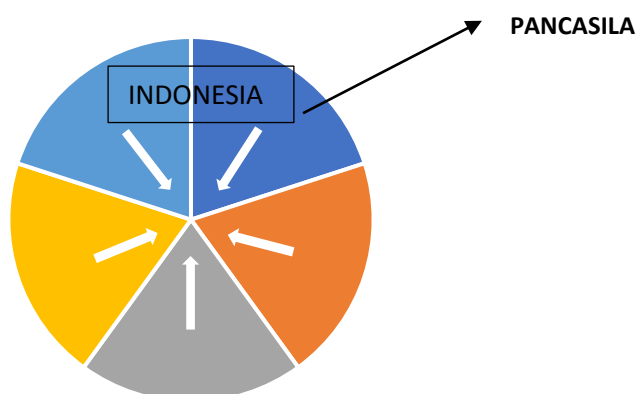
Tiga Model Filosofis bagi Pancasila

Dalam filsafat sendiri terdapat banyak aliran atau pemikiran yang memungkinkan terjadinya persilangan, bahkan benturan antar konsep, teori, atau idealisme. Misalnya saja, rasionalisme dan empirisme, idealisme dan realisme, eksistensialisme dan essensialisme, dan sebagainya. Persinggungan antar aliran pemikiran tersebut di satu sisi menyediakan dasar yang kuat bagi perkembangan pemikiran dan teori di dunia filsafat, tetapi di sisi lain memberikan ruang bagi menguatnya subjektivisme yang mengakar dan kemungkinan relativisme yang mendalam. Pada bagian ini, penulis tidak akan menjelaskan situasi filosofis di atas, tetapi mencoba menawarkan kemungkinan filosofis dalam kerangka pembentukan pemahaman terhadap Pancasila berparadigma filosofis.

Setidak-tidaknya ada tiga pemikiran penting dalam filsafat yang dapat membantu kita meletakkan pemahaman terhadap Pancasila. Pertama adalah paham logosentrisme, kedua strukturalisme, dan ketiga dialektika. Penulis menggunakan ketiga aliran pemikiran tersebut dan mencoba menarik garis penghubung dengan melihat jejak historis Pancasila dan kerangka konstruksi epistemologisnya yang mungkin.

Logosentrisme merupakan pandangan yang paling tua dalam filsafat, sebagaimana muncul dalam pemikiran Plato dan Aristoteles. Logosentrisme mengajarkan suatu pandangan atau pemikiran bahwa *logos* (terutama rasio atau pikiran) merupakan pusat atau dasar terpenting terbentuknya pemahaman manusia terhadap dunia atau realitas. Dalam tradisi filsafat Barat modern, logosentrisme meyakini bahwa pemahaman terhadap kebenaran dan makna suatu realitas hanya mungkin dan masuk akal melalui nalar atau rasio, melalui bahasa, dan bahkan juga struktur logika yang membentuk pengetahuan tentang realitas. Dalam konteks fenomenologi, Edmund Husserl misalnya, menegaskan bahwa pusat kesadaran dan pengetahuan manusia adalah pengalaman (1970). Meski dikirik oleh Derrida dalam *Of Grammatology* bahwa kecenderungan logosentrisme menganggap nalar dan bahasa sebagai pusat kebenaran sebagai ilusi (1976), bagaimana pun logos tetap memainkan peranan penting dalam upaya manusia mengembangkan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks logos sebagai pusat ilmu pengetahuan, penulis meyakini bahwa Pancasila dapat diidentikan sebagai logos nya Indonesia. Dalam pengertian Pancasila dilihat sebagai prinsip rasional dan pedomam umum obyektif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi sumber yang menyediakan arah bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia sampai ke masa depan. Seluruh entitas sosial, budaya, ideologi, politik, dan sebagainya terarah pada satu sumber yang sama, yaitu Pancasila. Jika digambarkan akan terlihat sebagai berikut:



Gambar ini memperlihatkan bahwa Pancasila adalah pusat dari seluruh realitas yang menentukan keberadaan Indonesia. Sumber kebenaran epistemologis dan ideologis yang memberikan dasar kuat bagi

Pemikiran filosofis kedua yang memberikan inspirasi bagi pemahaman terhadap Pancasila selanjutnya adalah strukturalisme. Pemikiran tentang strukturalisme sangat dipengaruhi oleh tokoh seperti Ferdinand de Saussure dan Claude Lévi-Strauss yang berfokus pada analisis linguistik. Tetapi dalam perkembangan filsafat selanjutnya Michel Foucault dalam *The Order of Things* (1989) mencoba menghubungkannya dengan kekuasaan dan Louis Althusser dalam *For Marx* (2005) yang menganalisis strukturalisme dalam hubungannya dengan ideologi dan masyarakat. Foucault melakukan analisis terhadap struktur wacana yang mendasari terbentuknya pengetahuan dan memastikan bahwa melalui struktur manusia dapat memahami realitas atau dunia di sekitarnya secara lebih baik. Sebagaimana dikemukakannya bahwa melalui struktur manusia dapat mengalami dan memahami keteraturan, bahkan yang lebih kompleks sekalipun (1989 : 149). Struktur memungkinkan manusia memahami dunia secara lebih baik.

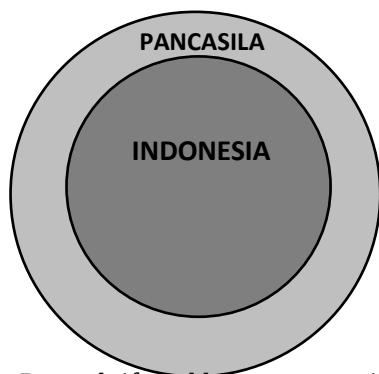
Sementara itu, Althusser lebih menekankan pada aspek kesatuan struktur yang memungkinkan terciptanya makna yang lebih holistik dan koheren. Ringkasnya menurut Althusser melalui struktur suatu makna yang pasti dari suatu ideologi dapat ditemukan dan diwujudkan dalam masyarakat (2005 : 67). Ringkasnya, strukturalisme memandang bahwa makna diproduksi oleh struktur yang lebih besar misalnya, bahasa, struktur sosial, struktur budaya, agama, dan sebagainya. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan produk struktur tertentu yang berusaha mengatur cara berpikir atau bertindak suatu masyarakat.

Ketika ditarik garis perhubungan dengan strukturalisme, kita dapat mengatakan bahwa Pancasila sebetulnya merupakan hasil dari struktur berpikir dan dialektika yang dalam dan holistik tentang bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Interaksi atau dialektika antar tokoh bangsa yang berasal dari latar belakang sosial-budaya yang berbeda dapat berarti juga struktur berpikir dan bahasa yang berbeda berhasil mewujudkan ideologi bangsa yang utuh dan kokoh.

Pancasila dalam perkembangannya kemudian menjadi bahasa bersama tentang toleransi, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila kemudian memproduksi makna yang menentukan sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Yang sangat menarik juga adalah bahwa struktur Pancasila dikonstruksi melalui model hierarkis-teleologis. Artinya, nilai-nilai dalam Pancasila dikonstruksi sedemikian rupa dari yang transenden menuju yang paling imanen dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kesadaran transenden diletakkan sebagai nilai pertama disusul nilai-nilai sosial-politik, dan diakhiri oleh nilai yang menjadi tujuan bernegara, yaitu keadilan sosial yang dapat artikan juga sebagai kesetaraan dan kesejahteraan. Meski demikian, tampak masuk akal untuk membayangkan juga bahwa nilai-nilai tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam satu kesatuan utuh yang saling mengadakan atau berada bersama (*co-existence*). Karena itu, mengabaikan salah satu nilai dapat saja diartikan sebagai meniadakan Pancasila secara keseluruhan.

Dalam konteks saling mengadakan atau berada bersama itulah, Pancasila digambarkan sebagai struktur yang mendukung keberadaan Indonesia. Ibarat sebuah bangunan dikonstruksi dari banyak elemen pokok (pasir, semen, batu, air, dll.) yang hanya mungkin ketika semuanya berada dalam kesatuan utuh, demikian halnya Pancasila disusun dari unsur-unsur yang berbeda yang memungkinkan bangunan Indonesia kuat dan kokoh. Karena itu, keberadaan bangsa dan negara Indonesia hanya masuk akal dengan membayangkan keberadaan Pancasila. Konsekuensinya adalah Pancasila adalah Indonesia dan Indonesia adalah Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila harus menjadi spirit hidup masyarakat Indonesia. Perspektif strukturalisme pada Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut:



Pada model ini, Pancasila digambarkan sebagai makna yang melingkupi seluruh bangunan Indonesia.

Perspektif terakhir yang menginspirasi pemahaman dan pemaknaan filosofis terhadap Pancasila adalah dialektika atau apa yang penulis identikan dengan model komunikatif. Mengikuti Hegel dan Marx, realitas (ide, sejarah, kesadaran, dsb.) dipahami sebagai sesuatu yang tidak pernah linear, tetapi selalu berada dalam proses dialektika dengan segala hal di sekitarnya. Dalam dialektika proses berpikir menekankan pada hubungan dinamis, meski kontradiktif, dan saling memengaruhi antara setidaknya-tidaknya dua hal, pemikiran, gagasan, atau teori. Sederhananya, konsep dialektika melibatkan proses tesis, antitesis, dan sintesis menuju pemahaman bersama terhadap realitas. Dalam teori dialektika, realitas tidak pernah konstan atau statis, tetapi terus bererak, berubah, dan terbaru. Gesekan dan benturan antar idealisme selalu menghasilkan ide atau konsep baru yang tidak sekedar menyatukan konsep-konsep yang saling bertentangan tersebut, tetapi bisa jadi dan serentak meleburkan.

Peleburan dalam konteks dialektika berarti menciptakan sesuatu yang sungguh-sungguh baru dan bermaknaan. Kontradiksi antar realitas (tesis dan antitesis) diselesaikan melalui sintesis, yang mengintegrasikan atau menyerap realitas-realitas tersebut ke dalam kesatuan yang lebih tinggi. Ideologi itu sendiri merupakan produk dialektika. Ideologi mengintegrasikan realitas yang saling bertentangan sehingga memunculkan kesadaran baru yang lebih obyektif dan universal.

Sebagai ideologi Pancasila terbentuk melalui proses dialektis yang berupaya menemukan jalan keluar dari kebuntuan idealisme yang diusung oleh masing-masing pihak. Misalnya, rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan produk nyata dari proses dialektika yang terjadi antara kelompok nasionalis dan kelompok religius. Sebagaimana dilaporkan oleh A.M.W. Pranarka dalam "Sejarah Pemikiran Pancasila" bahwa terjadi proses perbedaan pendapat dan perdebatan di dalam sidang umum kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipengaruhi oleh tiga ideologi, yaitu ideologi kebangsaan, ideologi Islam, dan ideologi Barat Modern Sekular (1985 : 47). Pranarka kemudian mencatat bahwa selama masa perumusan tersebut terjadi pertukaran ide, gagasan, dan kehendak di antara ketiga ideologi tersebut yang kemudian mengarah kepada kompromi untuk mencapai mufakat dan kesepakatan (1985 : 53-54). Hal ini sekali lagi menegaskan kemauan bersama untuk menerima dan mengupayakan jalan keluar yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Terhadap pencapaian gagasan penyatuan ideologi yang berbeda tersebut oleh Soekarno kemudian disebut sebagai *gentleman agreement*.

Dialektika perumusan ideologi Pancasila memberikan gambaran kepada kita sifat terbuka dan komunikatif dari proses yang terjadi di seputarnya. Dengan perkataan lain, sejarah lahirnya Pancasila ditandai dengan semangat membangun komunikasi yang dapat menjangkau semua kepentingan yang ada. Dengan alasan dan pertimbangan yang sama, penulis meyakini bahwa pemahaman dan peerwujudan Pancasila pada masyarakat Indonesia saat ini jauh lebih masuk akal jika menggunakan model dialektika atau komunikatif tersebut.

Masyarakat Indonesia adalah suatu masyarakat komunikatif, karena itu menghadirkan Pancasila sebagai ideologi yang dialektis dan komunikatif tampaknya akan lebih bersesuaian dengan karakter semacam itu. Dengan perkataan lain, nilai-nilai Pancasila harus terus-menerus berdialektika dengan keragaman yang ada di Indonesia. Misalnya saja nilai Ketuhanan dapat berdialektika dengan keyakinan keagamaan semua penganut agama yang ada. Demikian halnya nilai kemanusiaan dapat berdialektika dengan keyakinan dan cara menghormati manusia yang diwariskan melalui tradisi dan budaya masing-masing suku bangsa di Indonesia, dan seterusnya. Dialektika di antara Pancasila dan keyakinan masyarakat yang samai saat ini masih hidup dan

dipraktikan akan membantu pembentukan dan internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Model dialektika dapat digambarkan sebagai berikut:



Garis-garis dialektika.

Nilai-nilai Pancasila terus-menerus berada dalam proses dialektika dan internalisasi. Pada model ini, Pancasila berada di antara dan bersama nilai-nilai yang hidup dan dipraktikan dalam masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Pancasila setidaknya sebagai ideologi menghadapi tantangan kemerosotan dan bahkan bahaya keruntuhan, sebagaimana dialami oleh ideologi-ideologi besar dunia lainnya seperti Komunisme, Nasionalisme, Sosialisme, dan sebagainya. Berbeda dengan ideologi-ideologi dunia, kemerosotan dan bahaya keruntuhan ideologi Pancasila lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan rendahnya antusiasme masyarakat terhadap epistemologi Pancasila, serta minimnya perwujudannya secara nyata dalam kehidupan sosial-politik masyarakat, para pejabat pemerintahan, atau para pelaku politik.

Meski demikian, asa untuk menempatkan Pancasila sebagai sumber keyakinan masyarakat Indonesia akan tetap bertahan melalui upaya filosofis merefleksikan aspek ontologis dan epistemologis Pancasila dalam kaitannya dengan keberadaan nilai-nilai lain yang hidup dan dipraktikan masyarakat. Setidaknya-tidaknya ada tiga model yang dapat menjadi kekuatan Pancasila, yaitu model logosentrisme, model stukturalisme, dan model dialektis. Ketiga model tersebut memiliki kekuatan dan keunikan masing-masing. Meski demikian, jalan keluar yang paling mungkin adalah melalui model dialektis di mana keberadaan nilai-nilai Pancasila terus-menerus dikomunikasikan dengan nilai-nilai lain yang hidup dan dipraktikan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Althusser, Louis, 2005. *For Marx: Radical Thinkers*, Translated by Ben Brewster. London & New York: Verso.
- Derrida, Jacques, 1976. *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak, The Johns Hopkins University Press : Baltimore and London.
- Gadamer, Hans-Georg, 1989. *Truth and Method*. Trans. revised by Joel Weinsheimer & Donald G. Marshall. London & New York : Continuum.
- Foucault, Michel, 1989. *The Order of Things An archaeology of the human sciences*. London & New York: Routledge
- Husserl, Edmund, 1970. *Logic Investigations*. Translated by J. N. Findlay, Routledge : London & New York.
- Liotard, Jean-François, 1979. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Trans. By Geoff Bennington & Brian Massumi. Manchester University Press: Manchester.
- Mannheim, Karl, 1954. *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. Routledge & Kegan Paul Ltd: London.
- Marx, Karl and Engels, 1974. *German Ideology*. Edited by C.J. Arthur. Lawrence & Wishart : London.

- Pranarka, A.M.W., 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Centre for Strategic And International Studies : Jakarta.
- Poespowardojo, M.T. Soerjanto & Seran, Alexander, 2021. *Pancasila: Filsafat Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Roh Revolusi Mental*. Gramedia: Jakarta.
- Ricoeur, Paul, 1986. *Lectures on Ideology and Utopia*. Edited by George H. Taylor. Columbia University Press : New York.
- Rousseau, Jean-Jacques, 1994. *The Social Contract*. Translated by Christopher Betts. Oxford University Press : Oxford.
- Soekarno, 2006. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Penerbit Media Presindo: Yogyakarta.
- Tracy, The Count Destutt, 2009. *A Treatise on Political Economy*. Translated by Thomas Jefferson. The Ludwig Von Mises Institute Auburn: Alabama.